

DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI AMIEN RAISTamrin¹**Abstract**

This article explains about several democracy ideas type tell by Amien Rais in political reformation context. There are three reformation step done by Amien Rais to create democracy in Indonesia. From destroy centralistic power until organize work plan to make a democracy and society stability in Indonesia.

Terdapat tiga langkah reformasi yang dilakukan oleh Amien Rais dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia, tiga langkah ini diperlukan Indonesia untuk keluar dari situasi yang melingkupinya selama ini, diantara langkah-langkah tersebut. Pertama, meruntuhkan sistem kekuasaan sentralistik. Gerakan Reformasi hanya merupakan tahap awal dari tiga tahap yang diperlukan dalam mendorong demokratisasi, demokratisasi hanya akan terwujud jika kekuasaan menyimpang yang sudah ada diruntuhkan terlebih dahulu. Karena itu demokrasi tidak membiarkan adanya sistem kekuasaan absolut yang mendominasi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kedua, membangun landasan sistem bernegara yang benar-benar kokoh melalui proses amandemen undang-undang dasar, agar tidak terjadi penyelewengan pada masa depan. Ketiga, menyusun program kerja dan melaksanakannya untuk mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat²

Suksesi Kepemimpinan Nasional Sebagai Ide Reformasi Politik

Salah satu akar persoalan yang menyebabkan tumbuhnya berbagai anomali atau penyimpangan sosial dan politik menurut Amien adalah karena disfungsi kekuasaan sebagai akibat tidak berjalannya regenerasi dan suksesi politik, regenerasi terutama pada tingkat suprastruktur belum berjalan secara teratur.³ Penyebaran kekuasaan dilakukan melalui adanya suksesi atau pergantian kepemimpinan melalui lembaga demokrasi, tanpa adanya suksesi kekuasaan atau akan menumpuk, memusat dan menciptakan orang yang berkuasa sebagai diktator dan otoriter. Partisipasi sosial-politik masyarakat mengalami kebekuan bila kekuasaan terlalu lama oleh seorang penguasa.⁴

¹ Staf Pengajar Pada Jurusan Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas

² Uchrowi, 2004:154

³ Masdar, 1999:84

⁴ Thaha, 2004:237

Tawaran Amien tentang suksesi kepemimpinan merupakan salah satu jalan untuk mencairkan kebekuan proses demokratisasi di Indonesia.⁵ Karena tanpa perubahan figur tidak mungkin ada perubahan sistem, sistem tersebut dibuat oleh figur untuk mengawetkan *status quo*.⁶ Gagasan suksesi kepemimpinan nasional ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menduduki kekuasaan sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945, pembatasan kekuasaan itu merupakan salah satu unsur penting dalam paham demokrasi, tanpa adanya pembatasan kekuasaan maka mustahil mewujudkan cita-cita terjadinya proses demokratisasi.⁷

Bagi Amien sukses mendorong Suharto mundur baru merupakan sebuah langkah awal dari upaya reformasi total, gerakan reformasinya semata untuk meruntuhkan sistem kekuasaan otoriter yang menjadi penghalang demokrasi, karena itu dia tidak memiliki sentimen pribadi pada Soeharto.⁸ Amien menawarkan dua skenario suksesi kepemimpinan nasional sebagai mekanisme rekrutmen seorang pemimpin, diantaranya. Pertama, sistem Pemilu dan sistem rekrutmen keanggotaan DPR/MPR yang dibuat pada masa pemerintahan Orde Baru harus diubah, perubahan sistem ini diharapkan memberikan implikasi terhadap proses pemilihan calon pemimpin yang lebih demokratis. Dalam hal ini sistem politik yang sudah ada pada masa Orde Baru tetap dipertahankan, tetapi diiringi oleh adanya keterbukaan, agar aspirasi masyarakat dapat dideteksi dengan mudah. Kedua, melakukan dialog nasional mengenai suksesi kepemimpinan harus dimulai sejak dini, agar bangsa Indonesia memiliki waktu yang cukup panjang untuk memperoleh proses konvergensi sudut pandang yang cukup berjauhan. Karenanya dialog nasional mengenai suksesi tersebut dimaksudkan untuk menyatukan persepsi atau paling tidak saling memahami pandangan-pandangan yang berbeda.⁹

Prinsip-prinsip kepemimpinan yang akan dipilih langsung oleh rakyat, diantaranya: kejujuran, keterbukaan, kebersamaan, kerja keras, dan mengembangkan visi ke depan sejauh-jauhnya. Beberapa prinsip ini dibutuhkan oleh rakyat yang mengalami kehancuran oleh sebuah rezim, seperti upaya memperbaiki keadaan Indonesia yang telah "dihancurkan" oleh rezim Orde Baru.¹⁰ Amien menyebut beberapa kriteria suksesi kekuasaan seorang pemimpin nasional di Indonesia, diantaranya. *Pertama*, calon pemimpin bangsa itu harus sudah teruji kesetiaannya pada Pancasila dan UUD 1945. Kriteria ini tidak boleh diganggu gugat dan sudah sangat jelas. *Kedua*, seorang pemimpin

⁵ *Ibid.* p. 239

⁶ Rais, 1998:412

⁷ *Ibid.* p. 120

⁸ Uchrowi, *Op.Cit.* p. 265

⁹ Thaha, *Op.Cit.* p. 120

¹⁰ *Ibid.* p. 241

memiliki integritas pribadi, agar dia menjadi *uswathun hasanah* (contoh teladan yang baik) dan panutan bagi masyarakat disekitarnya, karena itu dia harus jujur, tidak korup, tidak terlibat dalam beberapa skandal susila. *Ketiga*, seorang pemimpin harus berlaku adil, mempunyai komitmen kerakyatan, mementingkan atau mendahulukan kepentingan bangsa diatas kepentingan partai, golongan, keluarga, dan pribadinya sendiri. *Keempat*, seorang calon pemimpin harus memiliki akseptabilitas yang tinggi. Keanekaragaman latar belakang penduduk Indonesia baik dari etnis, agama, golongan, maupun ras. menjadi tantangan yang berat bagi seorang calon pemimpin nasional untuk mengayomi demi persatuan dan kesatuan bangsa. *Kelima*, seorang calon pemimpin harus memiliki visi atau wawasan ke masa depan yang akan memasuki zaman globalisasi yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seorang calon pemimpin harus mengetahui dan menguasai iptek yang sedang berkembang tersebut. *Keenam*, seorang pemimpin seyogyanya mempunyai jangkauan (*reach-out*) internasional yang luwes dan jauh, Indonesia adalah bagian dari bangsa-bangsa lain yang hidup berdampingan di dunia ini, karena itu Indonesia tidak mungkin hidup sendiri tanpa bekerjasama dengan masyarakat dunia. Untuk menghindari *counter productive*, maka keenam kriteria ini sebagaimana yang dijelaskan Amien tidak perlu dihubungkan dengan seorang tokoh tertentu.¹¹

Disamping menggulirkan issue suksesi kepemimpinan nasional, Amien juga menganjurkan adanya dialog nasional untuk menampung pemikiran-pemikiran segar dari tokoh-tokoh kampus, ormas bukan Golkar, partai politik, tokoh LSM, tokoh pengusaha, juga tokoh-tokoh mahasiswa dan lain-lain yang berfikir ke masa depan, termasuk kepemimpinan nasional, kriteria presiden dan wakil presiden.¹² Dialog nasional tersebut dikemukakan Amien dalam konteks mewujudkan demokrasi, karena semangat demokrasi adalah memilih dari beberapa alternatif, sebuah negara demokrasi itu sangat luwes, apapun yang dianggap bagus untuk kepentingan rakyat banyak itu bisa dikerjakan.¹³

Dalam menjelaskan perubahan kepemimpinan politik di Indonesia Amien menjelaskan proses perubahan kepemimpinan merupakan sesuatu yang alamiah (*sunnatullah*), Amien menjelaskan "Setiap zaman atau setiap era itu melahirkan pemimpin yang sesuai dengan tantangan zaman serta problemnya. Jadi saya yakin, bahwa putaran millennium kedua-ketiga, kita menghadapi masalah-masalah yang secara kualitatif dan kuantitatif memang berbeda, sehingga diperlukan suatu sosok kepemimpinan yang

¹¹ *Ibid*, p. 118

¹² Rais, *Op.Cit*, p. 384

¹³ *Ibid*, p. 365

berbeda, yang bisa melakukan tugas kenegaraan itu tidak hanya aktif, tetapi juga melakukan manajemen aktif¹⁴

Rumus *father knows best* dan adanya *one man show* dalam perilaku politik yang muncul dari kepemimpinan nasional atau elite politik yang terlalu lama berkuasa tidak sehat dari kacamata demokrasi, karena bisa melahirkan kultus individu (*the cult of the individual*) yang bisa menumpulkan visi dan kreatifitas, dan bisa sebuah lapisan elite yang sudah ketewas lama memegang kekuasaan secara perlahan akan meyakini bahwa dirinya adalah pesonifikasi stabilitas dan eksistensi negara.¹⁵ 27

Secara tegas Amien Rais menerima aksioma politik yang dirumuskan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung untuk korup, dan kekuasaan yang tidak dibatasi pasti akan korup dan menyimpang (*power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely*).¹⁶ Baik kekuasaan absolut maupun ketiadaan kekuasaan (*powerless*) membahayakan kehidupan bersama, sebagaimana yang dijelaskan oleh ungkapan Amien terhadap aksioma Lord Acton diatas, "*Powerless tends to corrupt and absolute powerlessness corrupts absolutely* (tuna kuasa cenderung ke arah korupsi, dan tuna kuasa yang absolut akan menjurus korupsi absolut pula).¹⁷

Tuna kekuasaan (*powerless*) melahirkan ketidakmampuan, ketidakmampuan atau ketidakcakapan akan melahirkan orientasi yang kuat terhadap kekuasaan dalam politik (*syahwat politik*), syahwat politik ini mengandung tujuan-tujuan lain di balik pengejaran kekuasaan, seperti kepentingan ekonomi dan fasilitas lain yang diharapkan di balik pengejaran kekuasaan tersebut, "Dengan menggunakan politik uang sebagai ekspresi dari syahwat kekuasaan tak terkendalikan, maka dapat dipastikan pejabat yang mengejar kekuasaan lewat politik uang itu tidak memiliki kecakapan memadai"¹⁸

Terdapat beberapa penyebab munculnya tuna kekuasaan (*powerlessness*) tersebut, diantaranya dikemukakan oleh Amien melalui pendekatan yang digunakan oleh John Gaventa. Pertama, tuna kekuasaan tertanam dan meluas karena pengalaman berulang kali gagal dalam semua pengambilan keputusan. Karena kekuasaan dapat dilihat dari sudut siapa saja yang berpartisipasi di meja pengambilan kekuasaan yang menetapkan keputusan-keputusan penting dan mengikat, arena kekuasaan adalah pengambilan keputusan dan yang yang ditekankan adalah konflik-konflik pengambilan keputusan yang dapat diamati., karena itu yang menjadi perhatian juga adalah siapa yang

¹⁴ Thaha, *Op.Cit.* p. 134

¹⁵ *Ibid.* p. 233-234

¹⁶ Masdar, *Op.Cit.* p. 113

¹⁷ Susilo, 2004:8

¹⁸ *Ibid.* p. 22

lebih kuat dan unggul dalam pengambilan keputusan tersebut serta ada pihak yang lebih lemah dan gagal¹⁹.

Kedua, ketiadaan akses ke forum dan mekanisme pengambilan keputusan dari pihak-pihak atau issue-issue tertentu disebabkan oleh rintangan-rintangan yang dibuat oleh pihak yang dominan atau berkuasa serta melahirkan sikap pasrah dan tidak berdaya yang meluas. Pihak yang diuntungkan memiliki posisi yang lebih kuat oleh seperangkat nilai, keyakinan, ritual, dan aturan main yang secara sistematis membantu orang atau kelompok ini sehingga dapat membela kepentingan mereka. Karena itu berlaku peradilan politik, dimana terjadi penggunaan pranata hukum dan peradilan untuk menyingkirkan musuh-politik pemegang kekuasaan sehingga musuh-politik tersebut tidak dapat bersaing dalam arena pengambilan kebijakan dan keputusan.²⁰

Ketiga, penggunaan kekuasaan sebagai alat untuk pembentukan persepsi dan kesadaran manusia mengenai ketimpangan dan ketidakadilan yang ada dalam lingkungannya. Kekuasaan dijadikan sebagai sarana yang berhubungan dengan sosialisasi/pengendalian informasi untuk membentuk pemikiran dan pandangan orang, manifestasi dari tawakal dalam perspektif ketiga ini dapat dilihat dari fatalisme yang meluas, apati, mencela diri sendiri.²¹ Mereka yang tawakal pada persepsi pertama dan kedua diatas juga akan mengalami tawakal dalam perspektif ketiga ini.

Ketergantungan pihak yang tawakal kepada pihak yang berkuasa muncul dalam hubungan yang mengalami ketimpangan kekuasaan ini, ketergantungan ini melahirkan masyarakat yang tidak mampu mengartikulasikan kepentingan mereka dengan cara yang baik, tanpa menggunakan kekerasan.²² Tujuan gerakan reformasi yang digerakan mahasiswa dan masyarakat luas adalah merubah pola hubungan kekuasaan ini, agar basis sosial yang mengecil melalui proses panjang penyempitan kekuasaan yang mengandalkan unsur loyalitas segelintir orang yang dipercayai dapat diperluas melalui proses demokratisasi.²³

Struktur kehidupan politik diramalkan dapat bertahan lama jika struktur politik itu benar-benar memiliki *grassroots support* dan mempunyai legitimasi yang cukup kuat, dalam hal ini substansi politik lebih penting daripada bentuk formal suatu struktur politik.²⁴ Karena itu salah satu bentuk perubahan dari atas (elit) dalam gagasan penyebaran

¹⁹ *Ibid.* p. 11-13

²⁰ *Ibid.* p. 13-14

²¹ *Ibid.* p. 15

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* p. 17

²⁴ Leppenas, 1983:70

demokrasi yang dilakukan Rais adalah meyakinkan elit politik bahwa mereka benar-benar kuat jika memperoleh legitimasi politik dari bawah²⁵

Karena tidak ada struktur kehidupan politik yang sempurna, cara yang ditempuh untuk melakukan perbaikan kehidupan politik adalah moderat dan gradual sesuai dengan sifat agama Islam yang lembut, mengayomi dan transformatif.²⁶ Perubahan-perubahan transformatif yang diinginkan oleh Amien dalam budaya politik Indonesia adalah perubahan yang selalu mengalami kenaikan (*incremental*), tetapi terus menerus terjadi, bukan dengan cara mengalami melakukan mobilisasi massa (*people's power*)²⁷

Hal ini sejalan dengan budaya lunak (*soft nation*) yang dimiliki Indonesia, perubahan politik di Indonesia lebih tepat menggunakan cara-cara reformatif dan evolusioner daripada perubahan politik secara revolusioner, seperti di Iran.²⁸ Upaya untuk mencegah revolusi tersebut adalah dengan memperbaiki keadilan sosial dalam masyarakat, Rais menyimpulkan yang harus dilakukan Indonesia untuk menghindari dampak ideologi-ideologi revolusioner adalah terus "mendemokratisasikan politik dan ekonomi" dan "mendengarkan aspirasi yang berkembang dari bawah"²⁹

Untuk memperbaiki sistem politik yang ada tidak bisa dilakukan melalui jalur di luar struktur politik, tetapi harus dilakukan melalui jalur dari dalam struktur tersebut, "Bagi Amien Rais mendorong perubahan sistem politik konstitusional tidak bisa dilakukan di luar sistem-dengan berteriak melalui Koran, mimbar, dan demonstrasi, tetapi harus masuk dalam sistem".³⁰ Kecenderungan ini melahirkan anggapan bahwa Amien lebih menekankan perubahan politik lebih bersifat strukturalis daripada melalui arus bawah.³¹

Bentuk formal suatu struktur politik dapat dibuat sedemikian rupa, maka struktur kehidupan politik sebagaimana yang dijelaskan oleh Amien merupakan struktur kehidupan yang cair dan paling mudah berubah berbagai struktur kehidupan sosial yang ada, sedang kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan terlalu lambat berubah dibandingkan perubahan di bidang politik.³² Karena itu upaya untuk mewujudkan masyarakat demokratis tersebut adalah melalui seluruh jalur kehidupan yang ada, elit harus ditekan agar tidak pernah berhenti merubah diri mereka, sedangkan arus bawah

²⁵ Rais, *Op.Cit.* p. 94

²⁶ *Ibid.* p. 69

²⁷ *Ibid.* p. 100

²⁸ *Ibid.* p. 70

²⁹ Uhlin, *Op.Cit.* p.76

³⁰ Jurdi, 2004:39

³¹ Rais, *Op.Cit.* p. 90

³² Leppenas, *Op.Cit.* p. 70

diberi kekuatan moril untuk memasuki tahapan perjuangan baru melakukan pemantapan demokrasi rakyat³³

Beberapa strategi untuk melakukan tekanan-tekanan tersebut, diantaranya. Pertama, melalui jalur pendidikan politik kepada massa rakyat, agar mereka berani menyampaikan pendapat, sekalipun berbeda dengan penguasa. Kedua, meyakinkan penguasa bahwa legitimasi atau keabsahan mereka akan kuat jika benar-benar didukung oleh rakyat. Ketiga, peranan intelektual dalam memasyarakatkan demokrasi.³⁴ Intelektual diartikan Amien sebagai seorang yang tidak pernah berhenti berfikir dan senantiasa memiliki kepedulian terhadap masyarakat, sehingga dia mempunyai kewajiban moral untuk selalu menegakan kebenaran dan keadilan. Karena itu Amien tidak setuju dengan pendapat intelektual itu hanya di kampus saja, sepanjang dia memiliki komitmen kerakyatan dan keadilan, maka dia disebut sebagai intelektual.³⁵

Tujuan Gerakan Reformasi

Amien menjelaskan bahwa tujuan akhir gerakan Reformasi adalah kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat tercapai bila rakyat telah berdaulat penuh. Kedaulatan rakyat hanya akan terwujud bila mekanisme demokrasi diterapkan secara benar.³⁶ Amien menjelaskan beberapa prasyarat untuk dijadikan sebagai penilaian terhadap sebuah *political order* apakah termasuk sistem demokratis atau tidak, diantaranya. Pertama, akuntabilitas. Kedua, rotasi kekuasaan. Ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Keempat, pemilihan umum. Kelima, memiliki hak-hak dasar. Rumusan-rumusan pengertian demokrasi ini menurut Toha dijadikan pegangan oleh Amien Rais dalam mengungkapkan pemikirannya tentang Islam dan demokrasi.³⁷

Dalam sebuah tatanan politik demokratis menurut Amien sebuah partai politik yang berhasil meraih suara tertinggi dan terbanyak, tetapi belum mencapai suara mayoritas tunggal bisa atau kadang dikalahkan oleh partai politik lainnya yang memperoleh suara lebih rendah, karena mampu membangun koalisi sehingga mendapatkan suara mayoritas tunggal.³⁸ Hal tersebut dibuktikannya dalam bentuk sikap menerima kenyataan kekalahan partai PAN yang dipimpinnya, "...ketika partai saya berada di posisi kelima, saya mempertimbangkan kembali keputusan (untuk terus maju menjadi presiden)

³³ Rais, *Op.Cit.* p. 97

³⁴ *Ibid.* p. 94

³⁵ Amien, *Op.Cit.* p. 76.

³⁶ Uchrowi, *Op.Cit.* p. 352

³⁷ *Ibid.* 33

³⁸ Thaha, *Op.Cit.* p. 125

tersebut. Saya seorang demokrat. Dengan hasil pemilu seperti itu, saya merasa belum mendapat mandat cukup untuk meneruskan tekad saya.³⁹

Secara umum Amien sepakat dengan definisi demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" (*government of the people, by the people and for the people*). Namun definisi tersebut harus dijabarkan dalam beberapa kriteria universal yang merefleksikan secara substansial demokrasi sebagai system politik (dan ekonomi) yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat. Beberapa bentuk kriteria penjabaran demokrasi secara substansial tersebut, diantaranya dikemukakan oleh Amien.⁴⁰ 31

Pertama, partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan, partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara individual ini (*private citizen*) ini bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen yang dipilih oleh rakyat dan diberi kepercayaan untuk menyalurkan aspirasi mereka merupakan wujud partisipasi politik tidak langsung yang tidak mungkin dilakukan secara langsung oleh kendala luasnya wilayah geopolitik, sebagai gantinya maka prinsip jujur (jujur, bebas, rahasia dan adil) merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam proses pemilihan wakil-wakil rakyat tersebut.

Secara umum partisipasi politik dapat diartikan sebagai keterlibatan setriap warga negara yang dilakukan secara sukarela dalam mengambil bagian dalam proses penentuan pilihan dan perbuatan untuk mempengaruhi perbuatan dan pelaksanaan keputusan yang dilakukan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, atau aktif maupun tidak aktif.⁴¹ Dalam kaitan ini *partisipasi* merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia, tanpa partisipasi demokrasi mustahil dilaksanakan.⁴² Tinggi rendahnya partisipasi politik warga negara dipengaruhi oleh dua faktor, diantaranya. Pertama, kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua, sikap dan kepercayaan atau penilaian warga negara terhadap pemerintah. Kedua faktor ini juga dipengaruhi oleh factor lain, seperti status social dan ekonomi, aliansi politik orangtua dan pengalaman berorganisasi.⁴³

Konsep partisipasi tersebut dibatasi oleh Amien kedaulatan kepada rakyat, "Rakyat hanya mempunyai kedaulatan secara terbatas, khususnya di dibidang politik".⁴⁴ Peraturan-peraturan, norma-norma dan nilai-nilai ilahi merupakan menjadi paradigma program-program sosial, politik dan ekonomi yang ditentukan oleh rakyat melalui para

³⁹ *Ibid.*, p. 126

⁴⁰ Masdar, *Op.Cit.* p. 108-112

⁴¹ *Ibid.*, p. 225

⁴² *Ibid.*, p. 224

⁴³ *Ibid.*, p. 224

⁴⁴ *Ibid.*, p. 227

wakilnya, karena itu rakyat tidak dapat dan tidak boleh menggunakan kedaulatannya dengan semau-maunya sendiri.⁴⁵

Kedua, persamaan dibidang hukum. Negara hukum merupakan bentuk negara demokrasi, *rule of law* ini tidak membedakan latar belakang agama, ras, dan status sosial. Terdapat dua aspek yang menjadi persoalan signifikan dalam negara demokrasi, diantaranya disamping persoalan perlakuan sama di depan hukum adalah persoalan proses pengambilan keputusan hukum dan pelaksanaan produk-produk hukum atau aturan-aturan perundang-undangan di lapangan. Kedua aspek ini harus dilaksanakan secara konsisten dan adil dengan adanya dukungan institusi kontrol yang independen. Amien tidak percaya demokrasi lantas mayoritas lantas diunggulkan di atas minoritas, apalagi disertai adanya kecenderungan untuk sewenang-wenang. "Bila ini terjadi, maka demokrasi tersebut palsu dan bertentangan dengan prinsip dasar Islam sendiri, dimana kaum minoritas itu sangat dihormati, dilindungi dan diberi hak-hak sepenuhnya sebagai warga negara".⁴⁶

Sedangkan *rule of law* merupakan esensi demokrasi yang bisa mengatasi *rule of men* di Indonesia⁴⁷, uji coba dan praktek demokrasi di Indonesia mengalami kegagalan dan jalan buntu, mulai dari Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin pada awal kemerdekaan serta pemerintahan Soekarno, dan Demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan Soeharto. Sifat egaliter, penekanan kepada aspek unsur sistem dan hukum merupakan cermin budaya pesisir yang selalu kalah oleh budaya pedalaman yang lebih mengedepankan harmoni dan bertumpu kepada struktur patron-klien dalam pertarungan yang beberapa abad terakhir sejarah Jawa, sedangkan pergulatan politik Indonesia menurut antropolog Perancis Dennis Lombard merupakan perluasan pergulatan politik Jawa tersebut.⁴⁸

Ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Persamaan tidak bisa ditekankan kepada satu aspek saja, persamaan di bidang hukum hanya akan lengkap jika diiringi oleh persamaan di bidang social dan ekonomi. Untuk mencegah terjadinya justifikasi atau memberi peluang terhadap eksploitas yang kuat terhadap yang lemah, maka persamaan di bidang ekonomi bersifat *de facto*, tidak cukup dengan *de jure* saja.

Keempat, kesempatan memperoleh pendidikan yang sama. Demokrasi merupakan sistem yang sangat potensial membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas, prinsip persamaan tidak hanya berlaku dalam menjamin tegaknya kedaulatan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Amien, *Op.Cit.* p. 94

⁴⁷ *Ibid.*, p. 52

⁴⁸ Uchrowi, *Op.Cit.* p. 265

rakyat, tetapi juga berakru di bidang pendidikan. Tingkat pendidikan ini mempengaruhi tingkat kecerdasan dan daya kritis mereka yang nantinya mempengaruhi tingkat partisipasi politik dan proses pengambilan keputusan, tetapi tingkat pendidikan ini juga terkait dengan tingkat sosial dan ekonomi, kesempatan pendidikan dipengaruhi oleh distribusi pendapatan yang terjadi dalam masyarakat.

Kelima, kebebasan yang dijamin oleh undang-undang. Amien menyebutkan empat macam kebebasan yang inheren dalam sistem demokrasi, yakni kebebasan berbicara atau mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Disamping itu terdapat kebebasan atau hak untuk mengajukan petisi (*freedom of petition*) dan hak untuk protes atau beroposisi, sebagai alat kontrol dan untuk mencegah kekuasaan agar tidak mengarah kepada bentuk yang korup atau despotis. Unsur kebebasan merupakan kriteria demokrasi yang ditekankan oleh Amien untuk mencegah kegagalan dalam melakukan uji coba pelaksanaan demokrasi di Indonesia untuk kesekian kalinya.⁴⁹ Karena menurut Amien Rais penerapan praktek demokrasi di Indonesia baik pada awal kemerdekaan maupun pada masa-masa lima puluh tahun berikutnya menghadapi kesulitan sosiologis, politik, psikologis, ekonomis, dan kultural dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.⁵⁰

Amien menjelaskan terdapat empat macam kebebasan yang menjadi kriteria demokrasi, diantaranya, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkhabaran atau pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama.. Kebebasan itu mencakup juga hak protes dan hak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, kebebasan ini jarang ditemukan dalam praktek dan uji coba demokrasi di Indonesia baik selama kepemimpinan Soekarno maupun Suharto.⁵¹

Dalam konteks yang lain Amien menjelaskan esensi demokrasi tersebut terdiri dari 4 macam kebebasan, esensi tersebut dikemukakan Amien dalam rangka menghapuskan embel-embel demokrasi yang digunakan oleh praktek demokrasi di Indonesia yang terdiri dari 3 jenis demokrasi, yakni demokrasi Parlementer, Demokrasi Liberal, dan Demokrasi Pancasila, diantara esensi demokrasi yang dikemukakan Amien adalah kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut & kebebasan untuk sejahtera. Esensi demokrasi ini juga mencakup partisipasi rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, berjalannya *checks and balances*, dan tegaknya *rule of law*.⁵²

⁴⁹Thaha, *Op.Cit.* p. 246

⁵⁰ *Ibid.*, p. 103

⁵¹ *Ibid.*, p. 242

⁵² Susilo, *Op.Cit.* p. 47

Checks & balances ini berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kebijaksanaan pemerintah, mekanisme *checks & balances* ini merupakan ciri pokok dari demokrasi universal, karena itu mekanismenya tidak perlu dihubungkan oleh pemerintah dengan semangat *liberalisme*⁵³ Karena *checks & balances* ini tidak pernah berjalan secara wajar dalam praktek demokrasi di Indonesia, maka pemerintah tidak pernah tahu kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukannya.

Keenam, ketersediaan dan keterbukaan terhadap informasi. Rakyat perlu mengetahui situasi yang selalu berkembang dan mempengaruhi kehidupan mereka serta kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, tidak hanya kualitas pemimpin mereka. Untuk mencegah apriori dalam menerima atau menolak kebijakan, apalagi jika kebijakan tersebut menyangkut hal yang prinsip dan fundamental, maka rakyat harus *well informed* mengenai politik dan pemerintahan.

Ketujuh, mengindahkan etika atau *fatsoen* politik. Etika politik memang tidak pernah tertulis, tetapi sangat jelas bagi setiap orang yang paham tentang nilai-nilai demokrasi. Etika politik menghindari orang dari penggunaan segala cara, kekuasaan tanpa etika politik akan menghalalkan segala cara, karena itu demokrasi memiliki etika politik yang selalu harus diindahkan.

Kedelapan, kebebasan individu. Hak untuk hidup secara bebas dan memiliki *privacy* (kehidupan atau hak-hak yang bersifat pribadi) sepereti yang diinginkan adalah suatu prinsip demokrasi, kecuali jika kebebasan tersebut sudah merugikan pihak lain. *Kesembilan*, semangat kerjasama. Dinataranya prinsip yang harus dikembangkan dalam system demokrasi adalah kerjasama di antara warga negara untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang telah disepakati bersama, demokrasi tidak hanya menghargai sikap-sikap individualistis sebagaimana yang tercermin dalam pola hidup liberal, tetapi juga mengembangkan sistem kolektifitas dan kerjasama, seperti mekanisme dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Ide Menegakkan Demokrasi

Terdapat tiga agenda demokratisasi untuk mengatasi persoalan tuna kekuasaan yang berlangsung dalam proses ketidakseimbangan hubungan kekuasaan dalam rezim otoriter, diantaranya. Pertama, penguatan atau pemberdayaan pihak-pihak yang selama ini tuna kekuasaan dan terkalahkan, agar dapat berunding dengan pemegang kekuasaan yang selama ini menang dalam forum pengambilan keputusan.⁵⁴ Kedua, menciptakan batasan-batasan partisipasi rakyat, lahan-lahan politik mulai dibebaskan, dan media

⁵³ *Ibid.*, p. 49

⁵⁴ *Ibid.*, p. 19

massa mulai diperlonggar dan diberi kesempatan menyuarakan opini yang beranekaragam.⁵⁵ Ketiga, karena ada argumen dari literature demokratisasi bahwa *like produces like*, yakni rezim otoriter akan mewariskan budaya politik otoriter, dan lembaga-lembaga otoriter akan menghasilkan sikap-sikap yang otoriter pula.⁵⁶ Maka untuk tujuan jangka panjang adalah melakukan upaya untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada anak didik, dan menyiapkan mereka supaya dapat menjadi warga negara yang dapat berpartisipasi dan menghormati orang lain melalui pendidikan demokratisasi atau pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah upaya untuk mengenali warisan-warisan otoritarianisme di bidang sikap, keyakinan dan kelembagaan.⁵⁷

Kemajemukan dalam selama kekuasaan Orde Baru dipasung untuk kepentingan kekuasaan, aspek kunci dalam mendorong kemajemukan tersebut adalah penumbuhan budaya nasional yang bertumpu kepada pada keragaman budaya daerah. Pengembangan kebudayaan nasional berdasar kemajemukan etnis akan memberi dampak ekonomi luar biasa, terutama melalui sector pariwisata.⁵⁸ Penekanan budaya nasional terhadap unsure kemajemukan dalam masyarakat menurut Uchrowi terkait dengan latar belakang kehidupan pribadi Amien Rais yang dekat dengan kesenian, dia berasal dari kota Surakarta sebagai pusat kebudayaan yang mengajarkannya tidak hanya sebagai peminat terhadap kesenian, tetapi juga sebagai pelaku dalam bentuk kemampuan memainkan alat-alat kesenian, seperti wayang.⁵⁹

Sikap Amien terhadap pluralisme berakar kepada kesadarannya yang mendalam terhadap hakekat manusia berdasar keyakinannya pada agama, Negara menurut Amien juga harus menghapus segala bentuk diskriminasi⁶⁰ Keyakinan terhadap pluralisme ini juga diperkuat oleh proses sosialisasi dirinya selama menjalani pendidikan di Perguruan Tinggi di Yogyakarta, unsure pluralisme latar belakang masyarakat yang menjadi lingkungan pendidikan di Yogyakarta mempengaruhi keyakinan Amien terhadap nilai-nilai pluralisme tersebut.⁶¹

Kemajemukan, demokrasi dan keadilan tersebut terecermin dalam platform partai PAN yang didirikan oleh Amien, PAN adalah parpol yang memperjuangkan kedaulatan

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, p. 20

⁵⁸ Uchrowi, *Op.Cit.*, p. 313

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, p. 316,317

⁶¹ *Ibid.*, p. 310

rakyat, demokrasi, dan keadilan sosial⁶². Sedangkan pendirian PAN sebagai partai merupakan hasil ijtihad pribadi Amien dan beberapa orang yang setuju dengan platform PAN, bukan ijtihad Muhammadiyah yang menjadi latar belakang organisasi sosial keagamaan yang dipimpin oleh Amien Rais.⁶³ Keberadaan partai politik menurut Amien merupakan suatu keharusan dalam alam demokrasi, dalam kaitan ini partai-partai politik berperan sebagai artikulator dan agregator kepentingan dan aspirasi masyarakat.⁶⁴

Ide mendirikan partai politik merupakan keberadaan terjun politik secara langsung, ide tersebut muncul dari berbagai tarik menarik kepentingan sebagai sebuah resiko yang dijalani Amien pada saat dirinya sudah menjadi milik publik melalui keberhasilannya menggulirkan Reformasi politik melalui upaya menjatuhkan Suharto sebagai presiden, ide tersebut muncul pada saat dirinya berada dalam lingkungan orang-orang disekitarnya tak selalu sependapat satu sama lain, termasuk dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA) sebagai wadah tempat Amien bernaung⁶⁵.

Karena itu desentralisasi merupakan issue politik pertama yang dikemukakan oleh Amien Rais dan kawan-kawan separtainya dalam PAN, seruan tersebut disambut oleh pemerintahan Habibie dengan membuat Undang-undang Otonomi Daerah. Otonomi tersebut menjadi sarana pertama untuk mengangkat kemajemukan bangsa.⁶⁶ MPR memiliki peranan paling strategis dalam melakukan perubahan politik dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan Amin "MPR adalah lembaga paling majemuk di Indonesia. Saya percaya, jika MPR yang majemuk itu mengambil keputusan, hasilnya akan berada di titik tengah dan tak memihak golongan tertentu"⁶⁷.

Dalam kaitan diatas, maka UUD 1945 terlalu sederhana untuk menjadi acuan bernegara, karenanya undang-undang ini mudah diselewengkan sebagaimana yang dilakukan oleh Soekarno melalui 'demokrasi terpimpin' dan Soeharto melalui penggunaan pasal yang menyebut masa jabatan presiden adalah lima tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali, "Pasal itu telah digunakan Soeharto untuk terus menjadi presiden tanpa batas".⁶⁸

Terdapat tiga bentuk amandemen yang dilakukan Amien untuk melaksanakan tujuan reformasi, diantaranya selain masa jabatan kepresiden adalah ketentuan TNI dan

⁶² Thaha, *Op.Cit.*, p. 122

⁶³ Jurdj, *Op.Cit.*, p. 41

⁶⁴ Susilo, *Op.Cit.*, p. 71

⁶⁵ Uchrowi, *Op.Cit.*, p. 218

⁶⁶ *Ibid.*, p. 312

⁶⁷ *Ibid.*, p. 291

⁶⁸ Uchrowi, *Op.Cit.*, p. 265.

Polri yang harus memfokuskan diri menjadi alat negara yang lebih profesional untuk menjamin pertahanan, keamanan dan ketertiban, dan tidak terlibat politik, karena itu TNI dan Polri juga harus tidak lagi di parlemen⁶⁹ Tiga bentuk amendemen ini merupakan bentuk perubahan politik yang dilakukan Amien Rais secara konstitusional selama memegang jabatannya sebagai Ketua Umum MPR, dalam kaitan ini Amien menjelaskan peranan amendemen tersebut dalam proses reformasi politik sebagai sesuatu yang penting, "Jika MPR gagal mengamandemen (UUD 1945), gagallah seluruh proses Reformasi."⁷⁰

Karena itu prioritas utama yang dilakukan oleh Amien dalam melakukan amendemen UUD 1945 adalah menyangkut masa jabatan presiden, disamping melakukan perubahan system pemilihan Presiden yang juga tidak memadai, dimana untuk menegaskan prinsip kedaulatan rakyat serta menghindari politik "dagang sapi" diperlukan system pemilihan presiden langsung oleh rakyat, agar presiden mendapat legitimasi politik langsung dari rakyat.

Meskipun proses amendemen tersebut dilakukan oleh anggota MPR, tetapi sikap untuk melakukan amendemen tersebut ditentukan oleh keberadaan Amien sebagai Ketua Umum lembaga tertinggi negara tersebut. Hal ini tercermin dari keraguan Amien dalam melakukan amendemen tersebut, terutama dalam persoalan keberadaan TNI dan Polri dalam parlemen, dimana tantangan yang dihadapi dalam proses amendemen tersebut lebih banyak berasal dari TNI dan Polri sendiri. Namun sikap Amien untuk memisahkan TNI dan Polri dari kehidupan politik, agar mereka lebih profesional sebagai alat negara melalui amendemen UUD 1945 ini memperoleh dukungan dari mayoritas anggota MPR, pakar tata hukum negara⁷¹

Keberhasilan dalam melakukan amendemen UUD 1945 merupakan penyelesaian dua dari tiga tahap reformasi, sedangkan tahap ketiga adalah membuat dan melaksanakan program nyata mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan dasar Reformasi⁷² Tahap ketiga ini dalam bentuk kepemimpinan bangsa yang tercermin dalam kesiapan Amien menjadi presiden keenam Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Jeffrie Geovanie salah seorang perintis The Amien Rais Center, "Pak Amien sudah menyelesaikan tahap pertama dan kedua Reformasi. Tentu saja Pak Amien yang paling pantas menyelesaikan tahap ketiganya"⁷³

⁶⁹ *Ibid.*, p. 291

⁷⁰ *Ibid.*, p. 355

⁷¹ *Ibid.*, p. 288

⁷² *Ibid.*, p. 356

⁷³ *Ibid.*,

Proses demokratisasi menurut Amien dipengaruhi juga oleh distribusi pendidikan, kesenjangan distribusi pendidikan ditentukan oleh tingkat distribusi social-ekonominya. Kesenjangan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat dapat dipastikan bisa berdampak pada kesenjangan pendidikan serta mempengaruhi proses demokratisasi⁷⁴. Sektor pendidikan merupakan salah satu sector kesejahteraan masyarakat yang harus diperbaiki melalui peningkatan anggaran pendidikan, Amien tidak hanya melakukan amandemen terhadap pasal-pasal UUD 1945 tentang politik, tetapi juga sector pendidikan, diantaranya Amien sering mengemukakan hasil amandemen pasal 31 ayat 4 tentang sector pendidikan di berbagai kesempatan, dimana lewat sidang MPR disepakati bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁷⁵

Demokrasi dari perspektif ekonomi dijelaskan oleh Amien melalui sikap apatis dan frustrasi muncul dari proses alienasi sosial, Amien menjelaskan bahwa masyarakat bawah mengalami depreviasi social dan ekonomi yang sangat dalam yang menjadi pemicu kerusuhan-kerusuhan massa di berbagai daerah. Penyebab terjadinya kesenjangan social ini menurut Amien yang juga mengutip pendapat Mubyarto adalah kesalahan orientasi kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru.⁷⁶ Dalam kaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata ini, maka Amien menjelaskan keberhasilan pemerintah harus diukur, tidak cukup dinilai dengan ukuran makro, dalam kerangka berfikir ini maka Amien Reformasi "jilid tiga",⁷⁷

Seperti halnya dengan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) yang digunakan UNDP, maka dia mempersiapkan tiga program besar yang puncaknya adalah *kesejahteraan*. Program kesejahteraan ini bertumpu kepada pilar segitiga *pendidikan-kesehatan-ekonomi*. Dua program besar lainnya adalah *keselarasan* yang bertopang segitiga *religiusitas-kebudayaan-kelestarian*, serta program *ketenraman* yang mencakup segitiga *kesatuan-keamanan-keadilan*. Langkah menyangkut aspek *ketenraman, keselarasan, dan kesejahteraan* diyakininya menjadi kunci mewujudkan Indonesia yang 'aman, damai, dan sejahtera', sebagaimana yang diyakininya "Insya Allah itu bukan mimpi atau utopia saya, melainkan visi yang nyata".⁷⁸

Pemikiran Amien tentang Reformasi "jilid ketiga" diatas merupakan reaksi terhadap mekanisme otomatis sebagaimana dilakukan oleh pemerintahan Presiden Megawati, karena masalah itu menuntut langkah jelas dan cepat untuk mengatasinya, seorang

⁷⁴ *Ibid.*, p. 273

⁷⁵ *Ibid.*, p. 292

⁷⁶ *Ibid.*, p. 274

⁷⁷ *Ibid.*, p. 359

⁷⁸ *Ibid.*, p. 360

pemimpin bangsa harus mampu menggerakkan dan mengorganisasikan sendiri tim pembantunya dalam mewujudkan visi pemerintahan, sehingga mekanisme otomatis tidak bisa diharapkan.⁷⁸

Gagasan demokrasi Amien Rais dalam beberapa jilid reformasi yang dikemukakannya diatas mencerminkan gagasan moralnya sebagai kekuatan masyarakat sipil pada saat dia menggulirkan ide suksesi kepemimpinan melalui beberapa kriteria pemimpin yang ideal, unsur moralitas ini dalam gagasan demokrasi Amien Rais berkurang pada saat dia gagasan demokrasi yang dikemukakannya menyentuh wilayah langkah-langkah konkrit, penekanan Amien terhadap proses desentralisasi kekuasaan melahirkan gagasannya tentang masyarakat politik yang mengandung unsure kerjasama dan pluralisme (kemajemukan) sebagai bahagian proses Institusionalisasi (konsolidasi) demokrasi.

⁷⁸ *Ibid.*, p. 359

Bahan Bacaan

- Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam Di Malaysia, Sejarah Dan Aliran*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997
- Adha, Ilham Muhammad, *Menangisi Kekalahan Amien Rais, Ulama & Umat di Simpang Jalan*, Pustaka Amanah, 2004
- Allian, Muhammadiyah, *The Political Behaviour Of A Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*, Gadjah Mada University Pres, 1988
- Amal, Ichlasul, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988
- Budihardjo, Mirriam, *Partisipasi Dan Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta, LP3ES, 1982
- Donnel, Guillermo, *Transisi Menuju Demokrasi*, LP3ES, Jakarta, 1993
- Duverger, Maurice, *Partai Politik dan Kelompok Penekan*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Encyclopedia of Government and Politics*, Roulledge, New York, 1992
- Effendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam*, Galang Press, Yogyakarta, 2001
- Fatwa, AM., *PAN Mengangkat Harkat & Martabat Bangsa*, Penerbit Intrans, Jakarta, 2003
-, *PAN Menyongsong Era Baru, Keherusan Orientasi*, Republika, 2004
- Grugel, Jean, *Democratization, A Critical Introduction*, Hampshire:Palgrave, 2002
- Jurdi, Syarifuddin, *Elite Muhammadiyah Dan Kekuasaan Politik, Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004
- Kamaruddin, *Partai Politik Islam Di Pentas Reformasi*, Visi Publishing, Jakarta, 2003
- Koinuddin, *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi, Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Leppenas, *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta, 1993
- Linz, Juan J. et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat*, Mizan, Bandung, 2001
- Maliki, Zainudddin, *Demokrasi Tersandera*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001
- Mitchels, Robert, *Political Parties*, The Frees Press, New York, 1962
- Najib, Muhammad, *Ijtihad Politik, Poros Tengah Dan Dinamika Partai Amanat Nasional*, Serambi, Jakarta, 2000
- Rais, M. Amien., *Membangun Politik Aditufung, Membumikan Tauhid Sosial Menegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Penerbit Zaman Wacanulla, Bandung, 1998
- Sorensen, Georg, *Demokrasi Dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Subhan, Anel., *Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, , 1999
- Suhelmi, Ahmad, *Dari Kanan Islam Hingga Kiri Islam*, Darul Falah, , Jakareta, 2001

- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius*, Penerbit Teraju, Jakarta, 2004
- Uchrowi, Zaim, *Mohammad Amien Rais, Memimpin Dengan Nurani*, Penerbit Teraju, Jakarta, 2004
- Uhlen, Anders, *Oposisi Berserak*, Mizan, Bandung, 1997
- Wahono, Untung., *Peran Politik Poros Tengah Dalam Kacah Perpolitikan Indonesia*, Pustaka Tarbiatuna, Jakarta, 2003